

Abstrak

Direktorat Jenderal Perbendaharaan membuat sebuah inovasi yakni Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi SAKTI diciptakan untuk mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan negara yang lebih mudah, cepat, transparan, efektif, dan efisien. Salah satu fungsi Aplikasi SAKTI yakni pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM). Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bertugas untuk menguji SPM yang diajukan oleh satuan kerja. Jika terdapat ketidaksesuaian, KPPN harus menolak SPM yang diajukan. Penolakan SPM terus terjadi baik sebelum dan sesudah Aplikasi SAKTI diimplementasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pengguna layanan atas implementasi Aplikasi SAKTI, persepsi pengguna layanan terhadap penolakan SPM sebelum dan sesudah implementasi Aplikasi SAKTI, dan upaya yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi penolakan SPM. Penelitian dilakukan pada KPPN Kendari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan respon yang positif dari pengguna layanan terhadap Aplikasi SAKTI. Terjadi penurunan signifikan jumlah penolakan SPM khususnya penolakan formal pada KPPN Kendari setelah Aplikasi SAKTI diimplementasikan. Pengguna layanan setuju bahwa Aplikasi SAKTI telah efektif dalam meminimalisasi penolakan SPM. Penolakan SPM yang terjadi karena adanya human error petugas satuan kerja dan perbedaan persepsi petugas Seksi Pencairan Dana telah dilakukan upaya untuk lebih menekan angka penolakan SPM. Upaya yang dilakukan oleh satuan kerja antara lain lebih teliti dalam mengajukan SPM, sedangkan upaya oleh KPPN yakni membuat inovasi BOKORI 060, membuat panduan uraian SPM, serta melakukan sosialisasi dan Focus Group Discussion.

Kata kunci: Persepsi, Aplikasi SAKTI, Surat Perintah Membayar, Penolakan SPM

Abstract

The Directorate General of Treasury made an innovation, namely Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI was created to support the implementation of state financial governance that is easier, faster, more transparent, effective and efficient. One of the functions of the SAKTI is the creation of a Payment Order (SPM). KPPN is tasked with examining the payment order submitted by the work unit. If there are discrepancies, KPPN must reject the submitted SPM. Rejection of SPM continues to occur both before and after the SAKTI Application is implemented. This study aims to determine the response of service users to the implementation of the SAKTI

Application, service users' perceptions of SPM rejection before and after the implementation of the SAKTI Application, and efforts that need to be made to minimize SPM rejection. The research was conducted at KPPN Kendari. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques in this study were interviews, documentation, and questionnaire distribution. The results showed a positive response from service users to the SAKTI Application. There was a significant decrease in the number of SPM rejections, especially formal rejections at KPPN Kendari after the SAKTI Application was implemented. Service users agree that the SAKTI Application has been effective in minimizing SPM rejection. SPM rejections that occur due to human error of work unit officers and differences in perceptions of Disbursement Section officers have made efforts to further reduce the number of SPM rejections. Efforts made by the work unit include being more thorough in submitting SPM, while efforts by KPPN include making BOKORI 060 innovations, making SPM description guidelines, and conducting socialization and Focus Group Discussions.

Keywords: Perception, SAKTI Application, Payment Order (SPM), Payment Order Rejection.